

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KOTA BENGKULU**

Purniati^{*)}, Henny Aprianty, Rahiman Dani

**Program Studi Magister Administrasi Publik
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Indonesia**

^{*)}Email Koresponensi : Gumayatiek@gmail.com

Abstract

Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government mandates that the implementation of regional autonomy adheres to the principle of autonomy as wide as possible, real and responsible. The principle of autonomy as broadly as possible implies that autonomous regions are given the authority to regulate and manage all government affairs, including exploring sources of regional income so that the region becomes advanced and can implement the principle of regional autonomy without depending on other regions. Bengkulu City has an original source of regional revenue, one of which is parking fees. From various case studies in Indonesia, including Bengkulu City, where parking fees are one source of regional income. Zone 6 Panorama Market Bengkulu City is the research location on the grounds that this zone makes a large contribution compared to other zones. This study aims to determine and analyze the implementation of parking retribution policies in increasing Regional Original Income (PAD) in Bengkulu City. The research method used is qualitative evaluation with data collection techniques with direct observation, interviews, documentation. From the results of research conducted that parking fees increase the source of local revenue.

Keywords : *Public Policy, Local Acceptance, Parking Free*

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan Otonomi daerah, daerah mempunyai hak otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya, memilih pemimpin daerah, mengelola sumber daya, memungut pajak dan retribusi serta mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan pendapatan lain yang sah (Chitika, 2013). Sehingga untuk membawa kemandirian daerah, faktor keuangan merupakan ciri utama daerah berotonomi, *self supporting* keuangan merupakan salah satu bobot penyelenggaraan otonomi artinya memiliki kewenangan menggali sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri.

Sebagai daerah otonomi, idealnya semua pengeluaran pemerintah daerah dapat dicukupi dengan Pendapatan Asli Daerah, sehingga daerah benar-benar otonom. Akan tetapi, pemerintah daerah seringkali dihadapkan dengan beberapa masalah yang terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan/pendapatan daerah, antara lain yakni : (1) tingginya tingkat kebutuhan fiskal yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan terjadinya kesenjangan fiskal; (2) kualitas pelayanan publik oleh pemerintah daerah yang masih belum optimal dan juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah; (3) lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum; (4) Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat tidak mencukupi; dan (5) belum teridentifikasi secara maksimal potensi Pendapatan Asli Daerah yang riil.

Kota Bengkulu, salah satu daerah di Provinsi Bengkulu yang menjalankan otonomi daerah

dengan prinsip desentralisasi, juga harus kreatif mencari sumber pemasukan daerah. hal menarik dicermati adalah Pendapatan Asli Daerah dari retribusi parkir. Retribusi parkir merupakan salah satu bentuk retribusi di Kota Bengkulu. retribusi parkir memberikan kontribusi cukup besar penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan dibuktikan dari tahun ke tahun mencapai di atas 4 milyar rupiah, Ini menunjukkan fenomena retribusi parkir merupakan penunjang pendapatan sektor retribusi daerah. Akan tetapi implementasinya, retribusi parkir mempunyai kendala pelaksanaan pemungutan/pengelolaan sehingga diperlukan implementasi kebijakan.

Banyaknya wilayah parkir di Kota Bengkulu, ada satu wilayah yang menarik diamati yakni Pasar Panorama Kota Bengkulu. Dengan mobilitas padat, arus kendaraan ramai serta laju aktifitas masyarakat banyak menyebabkan banyak permasalahan yang timbul, mulai pelanggaran badan jalan, macet bahkan indikasi juru parkir illegal, juru parkir yang tidak punya SPT dan juru parkir yang ganda.

Penelitian ini sangat berbeda dibanding dengan penelitian lain, karena penelitian ini mencoba menggali seberapa jauh implementasi kebijakan retribusi parkir yang dilakukan untuk mendukung penerimaan asli daerah (PAD) di Kota Bengkulu. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bengkulu.

B. Metode Penelitian

Dalam menganalisa permasalahan penelitian menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan penelitian evaluasi, karena ingin melihat implementasi kebijakan retribusi parkir secara komprehensif dan menyeluruh. Informan penelitian ini berjumlah 25 orang yang terdiri dari : Informan Kunci yakni Kepala Dishub Kota Bengkulu, Kepala Bapenda, Kepala Daerah, Pimpinan Legislatif. Selain itu Oforman utama terdiri dari tukang parkir, bidang pendapatan, bidang perhubungan retribusi parkir, bidang Legislasi DPRD Kota Bengkulu dan informan pendukung masyarakat dan pedagang di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrument penelitian dengan observasi langsung ke lapangan, pedoman wawancara, menggunakan alat rekam, mengumpulkan bukti terkait menyangkut berkas-berkas untuk mendukung penelitian seperti table PAD, Perda, Perka dan berkas lainnya.

Analisis data yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data melalui analisis deskriptif kualitatif, yaitu data dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka serta di jelaskan dengan kalimat sehingga data yang diperoleh dipahami maksud dan maknanya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Data yang dianalisis berupa kata-kata atau kalimat-kalimat, baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi. Data yang dianalisis yaitu implementasi kebijakan retribusi parkir dalam meningkatkan PAD di Kota Bengkulu.

Adapun tahapan rencana analisis data dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Pengumpulan data
- 2) Peneliti mengumpulkan data-data yang relevan dengan judul penelitian
- 3) Pengelompokkan data
- 4) Pengelompokkan data dimaksudkan agar data-data tersebut mempunyai klasifikasi dan mudah untuk menganalisisnya waktu pembahasan dilakukan
- 5) Pembahasan data
- 6) Pada tahap ini, data dilakukan pembahasan dengan melihat data-data
- 7) Menulis hasil penelitian
- 8) Pada tahap terakhir ini, peneliti melakukan penulisan hasil peneliti

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembahasan ini akan dibuat dalam narasi yang menyangkut model/ instrument penelitian dimana Pembahasan penelitian ini dilakukan dengan menghubungkan aspek-aspek penelitian, akan tetapi untuk mencapai hasil yang diinginkan dan lebih efektif dalam pemaparan, maka tidak semua aspek penelitian dimasukkan dalam pembahasan karena ada beberapa aspek penelitian yang hampir sama sehingga diringkas ke dalam beberapa aspek penelitian. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat berikut ini :

Karakteristik dari masalah

Penelitian pada dasarnya adalah kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah. Di mana masalah merupa-

kan suatu kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi. Sebelum melaksanakan suatu penelitian, terlebih dahulu peneliti harus mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Dalam penelitian Tugas akhir ini, peneliti melihat beberapa masalah terkait implementasi kebijakan retribusi parkir di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Akan tetapi peneliti melihat permasalahan terkait retribusi parkir tidak terlalu signifikan, karena peneliti jarang menemukan masalah yang berarti.

Hal ini berarti bahwa, implementasi kebijakan dilaksanakan dengan serius untuk mewujudkan sebuah kehidupan yang seimbang yakni adanya *support* dari berbagai pihak mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu.

Adapun perolehan retribusi parkir setiap tahun yaitu :

Tabel 4.1
Perolehan Retribusi Parkir Tahun 2016-2020

No	URAIAN	Tahun (Dalam Milyar)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Retribusi Parkir	4.970	4.984	4.913	4.9178	5.417

Sumber : (Data Diolah dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu, 2021)

Dari table diatas, dapat kita lihat bahwa retribusi parkir cukup memberikan pemasukan besar bagi pendapatan asli daerah di sector retribusi daerah dengan kurun waktu 2016-2020. Sementara itu total retribusi daerah di Kota Bengkulu dapat dilihat :

Tabel 4.2
Perolehan Retribusi Daerah Tahun 2016-2020

NO	URAIAN RETRIBUSI DAERAH	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Retribusi Pelayanan parkir tempat umum	4.970.000	4.984.000	4.913.000	4.917.000	5.417.000
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan-Puskesmas	13.000	13.000	135.000	138.000	140.000
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Laboratorium	76.000	75.000	77.000	78.000	78.000
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	11.400	11.300	112.000	113.000	115.000
5	Retribusi Pemanafaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi-LRA	11.200	11.200	113.000	115.000	114.000
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	12.300	12.200	124.000	124.000	125.000
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	37.000	36.000	37.000	38.000	39.000
8	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	98.700	98.900	1.242.000	1.243.000	1.321.000

N O	URAIAN RETRI- BUSI DAE- RAH	Tahun				
		20 16	20 17	2018	2019	2020
9	Retribusi	2.3	2.6	2.89	3.25	3.87
	PKB-	45.	75.	9.	6.00	5.00
	Mobil	00	00	000	0	0
	Penumpa ng Minibus	0	0			
10	Retribusi	32.	32.	32.0	12.	13.
	Pem- berian	00	00	00.	000.	000.
	Izin	0.	0.	000	000	000
	Trayek Kepada Orang Pribadi	00	00			
		0	0			
11	Retribusi	32.	32.	32.0	16.	17.
	Terminal- Tempat	00	00	00.	000.	000.
	Parkir untuk Ken- daraan Penumpa ng dan Bis Umum	0.	0.	000	000	000
		00	00			
12	Retribusi	14	14	188.	123.	124.
	Pela- yanan	8.0	8.8	000.	000.	987.
	Pemerik- saan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Keba- karan	00	00	000	000	000
		0	0			
13	Retribusi	9.0	9.2	9.87	6.12	10.8
	Izin	00.	52.	5.	5.00	75.0
	Mendiri- kan Banguna n	00	00	000	0	00
14	Retribusi	12	12	127.	86.0	129.
	Rumah	3.0	5.0	000.	00.0	000.
	Potong	00.	00.	000	00	000
	Hewan	00	00			
15	Retribusi	55	55	564.	235.	245.
	Pela- yanan	8.0	9.0	000.	000.	000.
	Pasar- Pelataran	00.	00.	000	000	000
		0	0			
16	Retribusi	52.	52.	54.5	25.	25.6
	Pela- yanan	35	35	50.	350.	50.
	Pasar-Los	0.	0.	000	000	000
		00	00			
17	Retribusi	87	87	875.	354.	357.
	Pela- yanan	5.0	5.0	000.	000.	000.
	Pasar- Kios	00.	00.	000	000	000
		00	00			
18	Retribusi	5.8	5.8	5.65	2.37	2.27
	Pela- yanan	75.	75.	7.	5.00	5.00
		00	00	000	0	0

N O	URAIAN RETRI- BUSI DAE- RAH	Tahun				
		20 16	20 17	2018	2019	2020
	Pemerik- saan dan/atau Pengujian alat tera	0	0			
19	Retribusi	16.	17.	18.0	14.0	15.0
	Pela- yanan	00	00	00.	00.0	00.
	Kesehata n Rumah Sakit Umum Daerah	0	0.	000	00	000
		.00	00			
20	Retribusi	34	34	344.	315.	315.
	Pemakaia n	0.0	2.0	500.	000.	000.
	Kekayaan Daerah- Penyewa an Tanah dan Banguna n	00	00	0000	0000	0000
		00	00			

Sumber : (Data Diolah dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu, 2021)

Berdasarkan tabel di atas, kita bisa melihat bahwa retribusi parkir ditepi jalan umum memberikan pemasukan berarti dari sector retribusi daerah dengan konsisten diatas 4 Milyar dari tahun 2016-2020. Hal ini berarti bahwa kebijakan retribusi parkir sudah berjalan dengan baik. Dengan demikian ini merupakan peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bengkulu dalam bidang parkir, terlebih dengan kondisi yang ada DPRD Kota sudah menetapkan target parkir tahun 2016 sampai 2020 sebesar 5 milyar rupiah.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, kita bisa mengetahui bahwa potensi retribusi parkir cukup besar apalagi potensi retribusi parkir di Kota Bengkulu. Begitu juga dengan potensi retribusi parkir di Pasar Panorama, untuk lebih jelasnya dapat dilihat berikut ini :

Tabel 4.3
Tabel Pendapatan Retribusi
Parkir Kota Bengkulu Tahun
2016-2020

No	Ta- hun	Target	Realisasi	Per- sentase
1.	2016	5.000.00 0.000	4.970.96 1.820	99,27 %
2.	2017	5.000.00 0.000	4.984.52 8.400	99,69 %
3.	2018	5.000.00 0.000	4.913.12 9.888	99,90 %
4.	2019	5.000.00 0.000	4.917,12 9,888	98,60 %
5.	2020	5.500.00 0.000	5.417.12 9.888 5417129 888	97,80 %

Sumber : (Data Diolah dari Badan Pendapa-
tan Daerah Kota Bengkulu, 2021)

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa pendapatan asli daerah di Kota Bengkulu selalu mengalami peningkatan dalam hal realisasi yang diperoleh mulai dari tahun 2016-2018. Hanya di tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan covid lagi melanda sehingga berpengaruh juga pendapatan di Kota Bengkulu.

Selain itu penentuan potensi retribusi parkir juga berdasarkan atas jumlah titik parkir di Kota Bengkulu, dimana jumlah titik parkir secara legal di Kota Bengkulu terdiri dari 12 zona wilayah parkir. 12 zona wilayah parkir tersebut mempunyai target pendapatan tersendiri yang harus di-setor kepada Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Perhubungan Kota Bengkulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table berikut ini :

Tabel 4.4
Tabel Pendapatan Retribusi Parkir
Pasar Panorama Kota Bengkulu Tahun
2016-2020

No	Ta- hun	Target	Realisasi	Per- sentase
1.	2016	1.000.0 00.000	899.661.80 0	87,67 %
2.	2017	1.000.0 00.000	924.138.40 0	93,91 %
3.	2018	1.500.0 00.000	1.495.000. 400	97,95 %
4.	2019	1.500.0 00.000	1.255.330. 000	83,90 %
5.	2020	1.500.0 00.000	1.388.000. 000	89,20 %

Sumber : (Data Diolah dari Badan Penda-
patan Daerah Kota Bengkulu, 2021)

Berdasarkan tabel di atas, kita bisa melihat bahwa pendapatan yang diperoleh dari Pasar Pan-orama mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini berarti bahwa potensi retribusi parkir sungguh banyak di pasar panora-ma.

Karakteristik dari masalah

Bagian aspek karakteristik masalah terdiri dari :

Kejelasan isi kebijakan

Ada beberapa dasar hukum pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di Kota Bengkulu yang juga berlaku di 12 zona termasuk zona enam Pasar Panorama :

- 1) UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
- 2) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian kewenangan
- 4) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 tentang penetapan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kota Bengkulu
- 5) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dinas Kota Bengkulu
- 6) Perda Nomor 07 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- 7) Instruksi Walikota Bengkulu Nomor 06 tahun 2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang pelaksanaan Perda Nomor 07 tahun 2011
- 8) Perda Nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi tempat khusus parkir
- 9) Perda Nomor 5 tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran
- 10) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja dinas daerah Kota Bengkulu
- 11) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang pembentukan unit pelaksana teknis daerah parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu
- 12) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 57 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Bengkulu tentang pembentukan unit pelaksana teknis daerah parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu

Beberapa dasar hukum dan ketentuan pungutan retribusi parkir di atas, salah satu yang menarik adalah Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011. Perda tersebut dimaksudkan

sebagai acuan/pedoman bagi pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan di tepi jalan umum yang dimiliki / dikelola Pemerintah Kota Bengkulu dalam rangka terciptanya tertib lalu lintas dan perolehan Pendapatan Asli Daerah.

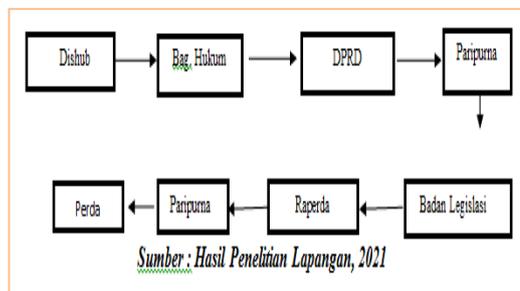
Pada saat penelitian di lapangan, peneliti menemukan isi dalam perda sesuai dengan kenyataan di lapangan. Selama pelaksanaan penelitian, peneliti memperoleh beberapa fakta yakni :

- 1) tarif parkir tidak berubah-ubah
- 2) karcis sering diberikan
- 3) Wajib pajak/petugas juru parkir tidak telat membayar tunggakan
- 4) Petugas parkir sudah tahu tentang retribusi parkir
- 5) Memberikan karcis parkir
- 6) Mengembalikan uang parkir apabila kelebihan
- 7) Petugas parkir memakai tanda pengenal parkir/atribut resmi
- 8) Petugas parkir berkerja dengan baik

Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, Peneliti melihat secara langsung beberapa point diatas yang membuat peneliti semakin yakin retribusi parkir di Pasar Panorama sudah menuju tahap yang lebih baik.

Seberapa Jauh Kebijakan Memiliki Dukungan Teoritis

Adapun alur pengusulan Peraturan Daerah retribusi parkir yaitu :



Gambar 5.1.
Proses Pembuatan Peraturan Daerah
Nomor 07 Tahun 2011

Gambar diatas, bermakna bahwa proses pengajuan perda tentang retribusi parkir melalui banyak tahapan yaitu berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Dimulai dengan pengajuan dari Dishub dan Badan Pendapatan Kota Bengkulu kemudian diajukan ke Pemkot Bengkulu melalui Kabag Hukum. Di Kabag Hukum inilah usulan tadi dilihat NA (Naskah Akademik) dan tinjauan psikologis, yuridis dan ekonomis. Kemudian jadi dalam bentuk draft perda kemudian diajukan ke DPRD dan DPRD melakukan pembahasan untuk diserahkan ke Badan Legislasi. Dalam bentuk Raperda dibahas kembali ke paripurna dewan untuk disahkan menjadi produk hukum yaitu Peraturan Daerah retribusi parkir, dengan melihat juga Peraturan Mendagri No 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Besarnya Alokasi Sumber Daya Terhadap Kebijakan

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa dukungan sumber daya manusia baik kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya

manusia berkaitan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kualitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia. Sumber daya manusia di Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Kota Bengkulu merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah organisasi yang menangani masalah perhubungan dan pendapatan retribusi parkir. Sehingga dengan mempunyai Sumber Daya Manusia yang bagus akan membuat target pendapatan retribusi di Pasar panorama akan tercapai. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dikemukakan Widodo (2001), dimana Sumber daya manusia berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia handal maka implementasi kebijakan berjalan lambat dan tidak efektif. Akan tetapi realita yang ditemukan di lapangan, sudah memenuhi unsur kriteria sumber daya manusia berkualitas. Petugas yang mengurus keuangan retribusi parkir mempunyai latar belakang manajemen dan keuangan sehingga mumpuni untuk melaksanakan tugas.

Untuk memberikan pelayanan terbaik dan mensupport pengembangan sumber daya manusia/ sumber daya aparatur dalam pelaksanaan retribusi parkir, di Kota Bengkulu telah dibentuk Unit Pelaksana Daerah parkir. Dengan pembentukan lembaga teknis parkir diharapkan pengembangan sumber daya manusia dapat berjalan dengan baik dan pelayanan juga akan baik sehingga akan berimplikasi dalam perolehan pendapatan asli daerah. Unit Pelaksana Teknis Daerah parkir telah dibentuk di tahun 2013

dengan berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang struktur organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu dan diperbarui lagi dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang pembentukan Unit Pelaksana Tekhnis Daerah parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu.

Dengan pembentukan Unit Pelaksana Tekhnis Daerah parkir ini sudah membuktikan bahwa parkir di Pasar Panorama mempunyai niatan baik dalam pengembangan sumber daya paratur apalagi dikelola dengan aparatur yang mumpuni. Ditambah lagi pengelolaan parkir yang berbasis elektronik dalam setoran parkir karena langsung menyerahkan setoran dalam rekening daerah dan Badan Perhubungan juga sudah melakukan kegiatan yang modern baik dalam system pelelangan lahan parkir, penyerahan syarat secara elektronik, dan setoran melalui elektronik. Hal ini beda sekali dengan pengelolaan parkir di tahun 2012, dimana parkir masih dikelola secara manual dan konvensional.

Berdasarkan fakta diatas, dapat kita ketahui bahwa system pengembangan manusia dan fasilitas pelayanan parkir sudah memenuhi kriteria pengembangan sumber daya terbaik dan ciri manajemen modern.

Lingkungan Kebijakan

Bagian aspek ini terbagi menjadi 2 yaitu :

Kondisi sosial ekonomi politik dan budaya masyarakat

Konsep Kebijakan mengenai retribusi parkir oleh Pemerintah Kota Bengkulu pada awalnya telah disiapkan oleh para administrator di

pemerintahan yaitu dengan melakukan lelang kepada pihak ketiga, kebijakan tersebut akan dituangkan pada peraturan walikota, akan tetapi para petugas parkir yang menuntut pemerintah daerah kota Bengkulu agar tidak melakukan lelang zonasi parkir kepada pihak ketiga membuktikan bahwa adanya pengaruh lingkungan-sistem politik terhadap pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah. Pada awalnya pemerintah berkeinginan melakukan lelang zonasi parkir dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu dengan target pencapaian hingga 1,5 milyar rupiah di zona enam Pasar Panorama dan target 5,5 Milyar per tahun.

Kebijakan yang akan dilakukan ini tentunya mendapat respon oleh para petugas parkir di Kota Bengkulu, sehingga adanya tuntutan untuk membatalkan lelang zonasi parkir melalui demonstrasi oleh para petugas parkir. Mengingat sistem politik di Indonesia saat ini adalah sistem pemilihan langsung dimana semua pengambil kebijakan ingin mempertahankan status *quo* melalui pemilihan dan berharap pencitraan yang positif dikalangan masyarakat. Begitu juga para *legitimated* di lembaga DPRD Kota Bengkulu pun ikut memperjuangkan aspirasi petugas parkir tersebut dengan harapan bahwa mereka bisa dianggap wakil rakyat yang mengerti dan mampu mengaspirasi keinginan rakyat, sehingga munculah dukungan-dukungan terhadap tuntutan para petugas parkir.

Dengan melihat faktor tersebut sebenarnya menjadikan dilema bagi pemerintah daerah karena

apabila dibatalkan system lelang maka target tidak akan tercapai dan petugas yang ada akan kesulitan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga dengan dasar Peraturan yang ada dan kepentingan politik jangka panjang dan ingin citra tetap baik dimasyarakat, Pemerintah juga memperhatikan factor support untuk pembangunan daerah dengan menghasilkan pemasukan yang besar dari retribusi parkir. Dengan pemasukan yang besar pula maka akan meningkatkan wibawa dan *trust* masyarakat bertambah. Sehingga banyak dorongan untuk melaksanakan system zonasi dengan melakukan lelang kepada pihak ketiga. Hal ini terbukti efektif karena mendatangkan pemasukan yang besar bagi Kota Bengkulu.. Terbukti bahwa factor social dan lingkungan juga turut andil dalam pelaksanaan retribusi parkir di Pasar Panorama.

Dukungan Publik Terhadap Sebuah Kebijakan

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diyakini banyak pihak telah menjadi kata kunci dalam pengembangan pembangunan di era otonomi daerah sekarang ini. Begitu juga halnya dengan pelaksanaan retribusi parkir di Pasar Panorama Kota Bengkulu, dimana implementasi parkir yang dilakukan yang melibatkan partisipasi masyarakat ternyata telah menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, buktinya perolehan pendapatan dari retribusi parkir. Partisipasi merupakan jembatan penghubung antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, kewenangan, dan kebijakan dengan masyarakat yang memiliki hak sipil, politik dan social ekonomi

masyarakat.

Dengan partisipasi masyarakat, posisi tawar masyarakat di mata pemerintah menjadi meningkat, masyarakat tidak selalu di dikte dan di dominasi oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan atau keputusan dalam pembangunan lingkungannya namun selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaannya. Konsep partisipasi merupakan suatu konsep yang luas, dan penting, karena salah satu indikator keberhasilan suatu program adalah adanya partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan retribusi parkir.

D. Kesimpulan

Bahwa analisis implementasi kebijakan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bengkulu (Studi Kasus Pasar Panorama) sudah berjalan efektif, tetapi masih ada beberapa catatan yang mesti diperbaiki Pemda Kota Bengkulu.

Adapun dasar implementasi kebijakan retribusi parkir di Pasar Panorama Kota Bengkulu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bengkulu sudah berjalan efektif, didasarkan pada point-point dibawah ini :

- 1) Karakteristik Masalah terdiri dari beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan retribusi di lapangan, sesungguhnya dinas terkait sudah berangsur bekerja secara maksimal, juru parkir yang nakal mulai ditindak, titik parkir illegal mulai ditertibkan sampai memberikan edukasi kepada petugas dilapangan dan tukang parkir agar

melaksanakan kerja dengan baik sehingga target retribusi bisa tercapai.

- 2) Karakteristik Kebijakan/Undang-undang mencakup :

Kejelasan isi kebijakan

Bahwa dasar pengenaan tarif retribusi parkir di Kota Bengkulu adalah dasar pengenaan setiap hari. Selain itu ada beberapa point dalam Perda Nomor 07 tahun 2011 yang sudah sesuai dilapangan, seperti masalah tarif retribusi parkir, petugas sudah memahami kerja mereka dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sudah tau juga aturan yang terkait misalnya akan ada penindakan dan teguran keras apabila menyalahi aturan yang ada.

Seberapa Jauh Kebijakan Memiliki Dukungan Teoristis

Bahwa kebijakan retribusi parkir sudah mendapatkan respon dan dukungan masyarakat. Sementara kalangan akademisi turut andil sebagai Tim Asistensi dan Legislatif memberikan dukungan penyusunan anggaran dinas terkait.

Besarnya Alokasi Sumber Daya Terhadap Kebijakan Tersebut

Bahwa alokasi yang terkait dengan sumber daya manusia, modal dan peralatan dewasa ini sudah baik, sudah ada pelatihan bagi petugas terkait, support penuh terhadap petugas, fasilitas online dalam setor hasil parkir dan sudah ada inovasi dengan melakukan pelelangan terbuka untuk beberapa titik parkir.

Kejelasan Dan Konsistensi Aturan Yang Ada Pada Badan Pelaksana

Juru parkir yang bekerja sudah taat pada aturan yang ada,

eksekutif juga bekerja dengan pihak ketiga berdasarkan aturan yang jelas sehingga mendapatkan respon yang positif dari legislative dan disupport masyarakat ditambah bentuk pengawasan dan pembinaan yang sudah tercantum dalam perda .

Tingkat Komitment Aparat Terhadap Tujuan Kebijakan

Pihak Legislatif memberikan support penuh terhadap pembahasan perda terkait retribusi dan memberikan masukan terkait pengelolaan parkir khususnya di Pasar Panorama. Begitu juga dengan pihak Eksekutif, memberikan support penuh terhadap pelaksanaan retribusi parkir di kota Bengkulu. Misalnya, memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir, memberikan masukan untuk peningkatan pendapatan retribusi parkir bahkan berkeliling langsung dengan dinas terkait, melakukan sidak di Pasar Panorama.

Akses Kelompok Luar Untuk Berpartisipasi

Dalam melakukan pengelolaan retribusi parkir di Kota Bengkulu, pihak Pemda Kota Bengkulu melibatkan pihak lain seperti Kantor Pelelangan Bengkulu dan pihak ketiga. Ada beberapa titik parkir di Kota Bengkulu dilakukan pelelangan oleh Kantor Pelelangan. Ada 4 zona dilakukan pelelangan di Kota Bengkulu yakni Zona 1, Zona 7, Zona 10 dan Zona 11.

3) Lingkungan Kebijakan, mencakup :

Kondisi Sosial Ekonomi Politik Budaya Masyarakat

Bahwa kondisi sosial ekonomi politik dan budaya masyarakat masih mempengaruhi kegiatan implementasi kebijakan retribusi parkir, dimana kekuatan politik masih sangat terasa seperti yang menyangkut kebijakan-kebijakan yang terkait masalah retribusi parkir. Dengan semakin tercapainya target retribusi di Pasar Panorama maka akan membuat kepercayaan public tinggi sehingga Pemerintah daerah bisa menjaga citra dan memberikan support politik dalam pelaksanaan Pemerintahan untuk menuju pencapaian terbaik dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu.

Dukungan Publik Terhadap Sebuah Kebijakan

Masyarakat mendukung penuh untuk keberhasilan pengelolaan retribusi parkir, dengan cara konsisten dan kesadaran untuk membayar retribusi parkir, bahkan menegur petugas parkir yang meminta bayaran tidak sesuai dengan karcis dan menegur petugas parkir bila bekerja tidak baik.

Tingkat Komitment Dan Keterampilan Dari Aparat

Aparat terkait baik Legislatif/ Eksekutif benar-benar berkomitmen penuh meraih hasil terbaik dari pengelolaan retribusi parkir dan tidak segan memberi reward dan teguran

kepada pihak terkait apabila ada permasalahan yang terjadi, apalagi Pasar Panorama adalah zona pakir yang menghasilkan 1,5 Milyar Per tahun, tentu mensupport tabulasi perolehan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bengkulu.

Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah :

1. Bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di Pasar Panorama Kota Bengkulu sudah efektif dan harus dilakukan lagi pembenahan mulai dari instrument, substansi dan sumber daya, agar perolehan Pendapatan Asli Daerah di Pasar Panorama semakin meningkat dan mendapatkan hasil terbaik sehingga semakin mensupport penuh total Pendapatan Asli Daerah di Kota Bengkulu secara keseluruhan
2. Bahwa respon dari masyarakat, Pejabat Dinas Perhubungan, Pejabat Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu, Lembaga Legislatif serta petugas pelayanan parkir dan masyarakat terkait implementasi kebijakan retribusi parkir di Pasar Panorama Kota Bengkulu mengenai kinerja petugas yang ada didalamnya harus semakin dibenahi dan diperbaiki agar implementasi

kebijakan retribusi parkir dapat berjalan dengan baik dan mendatangkan pemasukan semakin baik untuk perolehan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bengkulu.

bijaksanaan, dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan

Yani, Ahmad. 2009. Menakar Otonomi Daerah, Rajawali Press, Yogyakarta

Daftar Pustaka

- Abdal, 2015. Kebijakan Publik Memahami Konsep Kebijakan Publik, Buku Daras Mendapat Bantuan dari DIPA-BOPTAN UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Chalid, Pheni. 2005. Keuangan Daerah dan Investasi Desentralisasi dan Tantangan dan Hambatan, Kemitraan. Jakarta.
- Dye, Thomas R. 1996. Understanding Public Policy, Prentice Hall. New Jersey.
- Kencana Syafiie, Inu, Azhari. 2005. Sistem Politik Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama
- Lexy J. Maleong, 2005. Metode Penelitian Sosial, PT Gajah Mada University Pers. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2004. Pajak dan Retribusi, Edisi Revisi, Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nugroho, Rian. 2012. Public Policy. Edisi Keempat Revisi, PT. Elex Media Komputindo. Kompas Gramedia. Jakarta.
- Suryani, Basri Bado dan Syamsu Alam, 2020. Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah Program Studi Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar.
- Thoha, M. 2012. Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Ulin, P. R., Robinson, E. T., & Tolley, E. L., 2005. Qualitative Methods in Public Health: A Field Guide for Applied Research. San Francisco: Jossey-Bass.
- Wahab, solichin Abdul. 2008. Analisis Ke-